

hKEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

DATA CAPAIAN KINERJA BIDANG DATUN PERIODE JANUARI 2018 OKTOBER 2018

No	Satuan Kinerja	Bantuan hukum										Pertimbangan Hukum						Penegakan hukum			Tindakan hukum lain			Pelayanan hukum			Peny elam atan Keua ngan Nega ra	Pemulihan Keuangan Negara	Pup	Jumlah Mou	Per kar a Pen ting	Ket			
		Masuk					Selesai					Skk nonlitigasi			Pendapat hukum			Pendampingan hukum			Sisa	Masuk	Selesai	Sisa	Masuk	Selesai							Sisa	Masuk	Selesai
		Sisa	P N	P T	M A	P K	P N	P T	MA	PK	Sisa	Masuk	Selesai	Sisa	Masuk	Selesai	Sisa	Masuk	Selesai	Sisa															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1.	Kejati Malut	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	8	4	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	23.463.430	--	4	--	--		
2.	Kejari Ternate	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	69	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	6	--	194.846.582.-	--	2	--	--		
3.	Kejari Tidore	--	1	-	-	-	-	-	--	--	--	53	53	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	11	11	--	26.600.000	--	9	--	--		
4.	Kejari Halut	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	10	--	55.033.770,-	--	4	--	--		
5.	Kejari Halteng	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	5	--	--	--	4	--	--		
6.	Kejari Halsei	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	6	--	--	--	181	--	--		
7.	Kejari Sula	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	5	--	3.850.503	--	3	--	--		
8.	Kejari Morotai	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	32	32	--	1	1	--	2	2	--	--	--	--	--	--	14	14	--	160.402.632,61.-	--	8	--	--		
9.	Kejari Halbar	--	-	-	-	-	-	-	--	--	--	3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	3	--	25.000.000	--	2	--	--		
	Jumlah	--	1	-	-	-	-	-	--	--	--	182	94	--	2	1	--	3	3	--	--	--	--	--	--	70	70	--	462.596.917,61	--	217				

**An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**PENDI SIJABAT, SH., MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19630811 199103 1 008**

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PERIODE JANUARI S/D OKTOBER 2018**

1	KEJAKSAAN 2	PAGU ANGGARAN KEGIATAN			REALISASI			KET (%)
		PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA LITIGASI (Rp)	PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA NON LITIGASI (Rp)	LAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN HUKUM GRATIS (Rp)	PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA LITIGASI (Rp)	PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA NON LITIGASI (Rp)	LAYANAN INFORMASI DAN PELAYANAN HUKUM GRATIS (Rp)	
1.	KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA	96.920.000,-	24.000.000,-	9.000.000,-	--	24.000.000,-	2.250.000,-	20,20%
2.	KEJAKSAAN NEGERI TERNATE	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	6.000.000,-	--	28,57%
3.	KEJAKSAAN NEGERI TIDORE KEPULAUAN	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	6.000.000,-	3.000.000,-	42,85%
4.	KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	15.000.000,-	5.000.000,-	95,23%
5.	KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	--	4.500.000,-	21,42%
6.	KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA SELATAN	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	15.000.000,-	6.000.000,-	100%
7.	KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	5.000.000,-	2.000.000,-	33,33%
8.	KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SULU	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	3.000.000,-	2.500.000,-	26,19%
9.	KEJAKSAAN NEGERI PULAU MOROTAI	--	15.000.000,-	6.000.000,-	--	9.000.000,-	1.000.000,-	47,61%

**An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**PENDI SIJABAT, SH., MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19630811 199103 1 008**

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

Kendala/Permasalahan & Solusi/Kebijakan Dalam Pencapaian Kinerja Se Wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

No.	Kendala / Permasalahan	Saran / Pemecahan
1.	Adanya Pagu Anggaran Litigasi yang cukup besar dibandingkan dengan Pagu Anggaran Non Litigasi dan Pelayanan Hukum. Sesuai dengan Bab VII angka 2 dari Perja Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 Bahwa “biaya perkara dan biaya operasional kegiatan pemberian bantuan hukum kepada negara atau pemerintah dibebankan sepenuhnya kepada pemberi kuasa , sedangkan pemberian bantuan hukum kepada internal kejaksaan dibebankan kepada DIPA Kejaksaan, sehingga sangat berpotensi penyerapan anggaran Bidang Datun (khususnya Asdatun Kejati) setiap tahunnya rendah.	Agar Dalam DIPA Tahun anggaran yang akan datang, Pagu anggaran penanganan perkara Non Litigasi dan Pelayanan Hukum Lebih Besar dari Pagu anggaran perkara Litigasi
2.	Belum ada Pengadilan Tata Usaha Negara pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, perlu ada Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk mempermudah masyarakat/Pemerintah Daerah/BUMD/BUMN, mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara
3.	- Kurangnya sumber daya pada Bidang datum (baik para Kasi dan JPN) mendapatkan pelatihan / Diklat di Bidang Datum. - Pegawai Tata Usaha yang sangat minim bahkan didapati pada Kejaksaan Negeri Diwilayah Kejati Malut pada Seksi datum tidak ada Tata Usahanya.	- Agar Kasi Datum dan Jaksa yang belum ikut Diklat Datum diusulkan untuk mengikuti Diklat - Pada setiap Seksi Bidang datum supaya diadakan pegawai Tata Usaha
4.	Masih adanya pemikiran atau keragu-raguan stake pholder bahwa Kejaksaan melekat sebagai Penyidik, sehingga ada kekhawatiran jika nanti akan melakukan kerja sama maka Kejaksaan malah bukan memberikan pendampingan tetapi membongkar kasus tersebut sebagai kasus pidana korupsi.	<ul style="list-style-type: none">• JPN pro aktif melakukan sosialisasi tentang tupoksi DATUN/JPN kepada stake holder.• JPN memberikan pemahaman kepada stake holder bahwa setiap JPN melakukan pendampingan tidak akan membawa masalah tersebut ke ranah pidana dan sungguh-sungguh memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya.• JPN tetap merahasiakan data dan informasi yang diberikan stake holder.• JPN dalam setiap melakukan pendampingan kepada stake holder tidak dipungut biaya.
5.	Pemerintah Daerah dan BUMD banyak yang belum memahami TUPOKSI Jaksa sebagai Pengacara Negara di dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.	Pengoptimalan berupa sosialisasi kepada Pemerintah Dearah dan BUMD terhadap Tupoksi Kejaksaan dalam bidang Datum yakni bergadengan dengan Seksi Intelijen
6.	Kurang sekali minat masyarakat untuk datang berkonsultasi terhadap permasalahan hukum yang dialaminya di kantor Kejaksaan.	Agar minat masyarakat untuk datang berkonsultasi terhadap masalah-masalahnya dioptimalkan dengan seksi Intelijen, dalam Penyuluhan Hukum kepada masyarakat menjelaskan dan mengarahkan agar masyarakat datang untuk menanyakan atau berkonsultasi guna mendapat Pelayanan Hukum di kantor Kejaksaan secara cuma-cuma atau gratis
7.	Belum jelas batasan penyelesaian pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam penagihan piutang kepada debitur apakah setelah adanya surat	Perlu adanya suatu aturan yang jelas tentang hal tersebut

	pernyataan kesanggupan pembayaran atau sampai pada piutang lunas dibayar	
--	--	--

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PENDI SIJABAT, SH., MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19630811 199103 1 008

KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA**RENCANA KERJA BIDANG DATUN TAHUN 2019**

No.	Bantuan Hukum		Pertimbangan Hukum			Penegakan Hukum	Tindakan Hukum Lain	Pelayanan Hukum	Satuan Biaya Penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara		Ket.
	Litigasi	Non Litigasi	Pendampingan Hukum	Pendapat Hukum	Audit Hukum				Litigasi	Non Litigasi	
1.	5	8	3	3	3	3	1	12	@ 12.000.000,-	@ 3.000.0000	Biaya Pos Pelayanan Hukum @ 750.000,-

**An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**PENDI SIJABAT, SH., MH.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19630811 199103 1 008**